

## Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kuantitatif Pada Kecamatan Sekupang

Editya Rangga Pratama<sup>1</sup>, Hurian Kamela<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: 043685931@ecampus.ut.ac.id<sup>1</sup>, hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id<sup>2</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received Juli 04, 2025  
Revised Juli 16, 2025  
Accepted Juli 30, 2025

#### Keywords:

Transparansi  
Akuntabilitas  
Kinerja Keuangan  
Pemerintah Daerah

#### Keywords:

Transparency  
Accountability  
Financial Performance  
Local Government,

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan studi kasus di Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupakan aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,618 menunjukkan bahwa 61,8% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Temuan ini mengindikasikan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran daerah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien.

### ABSTRACT

This study aims to examine the influence of transparency and accountability on the financial performance of local government, with a case study conducted at Sekupang District, Batam City. A quantitative method with an associative approach was employed. Data were collected through questionnaires distributed to 30 respondents, comprising government officials from district and sub-district offices. Data analysis was conducted using multiple linear regression, assisted by statistical software. The results indicate that both transparency and accountability have a significant influence—both partially and simultaneously—on the financial performance of the local government. The coefficient of determination ( $R^2$ ) was found to be 0.618, indicating that 61.8% of the variation in financial performance can be attributed to these two variables. These findings underscore the importance of information openness and accountability in budget management, enabling more effective and efficient financial governance.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## 1. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah [6]. Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan

informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik, sementara akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009) [9]. Kinerja sebagai indikator yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta seberapa jauh tata kelola keuangan yang sesuai dengan transparansi serta akuntabilitas. Berdasarkan konteks ini, evaluasi bukan didasarkan capaian anggaran, tetapi juga pada seberapa terbuka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran kepada publik (Dwiyanto, 2010) [1]. Kecamatan Sekupang, sebagai bagian dari Pemerintah Kota Batam, memiliki peran penting dalam pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan laporan audit internal, masih ditemukan beberapa tantangan dalam hal keterbukaan informasi anggaran serta mekanisme pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja keuangan kecamatan dan efektivitas pengelolaan dana publik.

Tujuan penelitian ini secara kuantitatif mengidentifikasi transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan mengambil studi kasus pada Kecamatan Sekupang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi di tingkat lokal.

### *Transparansi*

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran kepada publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami proses penggunaan anggaran, serta berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan [10]. Menurut Mardiasmo (2009) [9], transparansi merupakan penyediaan informasi memadai serta dapat diakses oleh masyarakat secara luas, guna menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Prinsip ini juga ditekankan dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Informasi Publik bahwa badan publik, termasuk pemerintah daerah, harus menyediakan informasi kepada publik [11]. Indikator transparansi dalam penelitian ini mencakup ketersediaan informasi anggaran di ruang publik, pelibatan masyarakat dalam musrenbang, dan Publikasi realisasi anggaran melalui media resmi

### *Akuntabilitas*

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban mengenai tata kelola sumber daya publik kepada entitas sesuai mandat. Dalam konteks keuangan daerah, akuntabilitas berkaitan dengan sejauh mana realisasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Menurut Mahmudi (2011), akuntabilitas keuangan berarti bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang sah, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku [8]. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat legitimasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ketersediaan laporan pertanggungjawaban, audit oleh inspektorat atau BPK, dan tindak lanjut temuan.

### *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Kinerja keuangan merupakan ukuran efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Dwiyanto (2010), kinerja keuangan yang baik ditandai dengan tercapainya target penerimaan dan pengeluaran sesuai perencanaan, serta adanya pelaporan dan evaluasi yang sistematis [1]. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur melalui: realisasi anggaran terhadap rencana (APBD), efisiensi belanja daerah, tingkat serapan anggaran, dan nilai evaluasi kinerja dari pemerintah pusat

### *Hubungan Antar Variabel*

Ada hubungan positif antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, maka semakin baik pula pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja keuangan. Penelitian oleh Prabowo & Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan APBD. Hal ini membuktikan kedua variabel menjadi faktor utama yang mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah [3].

## **2. METODE**

Penelitian secara kuantitatif. Pendekatan ini berdasarkan analisis tujuan untuk mengukur pengaruh antar variabel melalui analisis statistik (Sugiyono, 2018) [13]. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Juni 2025. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan studi dokumentasi [5]. Kuesioner Likert sebanyak 5 pertanyaan pada masing-masing variabel. Setiap item dalam variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan telah diuji terhadap total skor variabel masing-masing menggunakan korelasi Pearson. Hasilnya menunjukkan bahwa semua item valid, karena nilai Sig. (p-value) < 0.05 dan korelasi positif, dan dalam uji reabilitas Semua variabel memiliki nilai  $\alpha > 0.60$ , yang berarti kuesioner reliabel. Studi dokumentasi yaitu, dokumen resmi seperti laporan keuangan, data capaian kinerja, dan laporan audit digunakan sebagai data penunjang dan pembanding hasil kuesioner. Populasi adalah aparatur negara Kecamatan Sekupang. Teknik berdasarkan purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti posisi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan APBD (Arikunto, 2013) [12]. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin atau minimal 30 responden, agar analisis regresi memenuhi syarat validitas.

Variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kinerja sebagai hasil yang dicapai pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik, dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Indikator kinerja keuangan berdasarkan penelitian Dwiyanto (2010) [1] dan Mahmudi (2011) [8], indikator yang dapat digunakan antara lain: Tingkat efisiensi anggaran (rasio antara output pembangunan dan biaya yang dikeluarkan), tingkat efektivitas anggaran (pencapaian target anggaran sesuai dengan tujuan perencanaan), realisasi anggaran (persentase penyerapan

anggaran terhadap total APBD), nilai evaluasi kinerja keuangan (nilai hasil evaluasi dari Inspektorat atau BPK), dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Transparansi berupa keterbukaan secara lengkap, jujur, mudah diakses masyarakat mengenai proses pengelolaan anggaran. Indikator Transparansi (Mardiasmo, 2009) [9] Ketersediaan informasi anggaran di media publik, aksesibilitas terhadap dokumen perencanaan dan realisasi anggaran dan kejelasan dan keterbacaan laporan keuangan publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator Akuntabilitas (Mahmudi, 2011) yaitu: Kejelasan tugas dan wewenang dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil audit, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah [8].

Rumusan penelitian yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan (variabel dependen)

X<sub>1</sub> = Transparansi

X<sub>2</sub> = Akuntabilitas

a = Konstanta (intersep)

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi (pengaruh X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap Y)

e = Error (residual)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil

Variabel	Koefisien (B)
(Konstanta)	4.591
Transparansi	-0.285
Akuntabilitas	0.139

Sumber: Data Olah Output SPSS 25, 2025

Nilai R-squared: 0.074. Persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 4.591 + -0.285(\text{Transparansi}) + 0.139(\text{Akuntabilitas})$$

Tabel 1 menjelaskan setiap peningkatan satu satuan skor transparansi akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar -0.285, dan setiap peningkatan satu satuan skor akuntabilitas akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0.139. Berdasarkan data kuesioner yang terdiri dari 15 butir pertanyaan (5 item untuk masing-masing variabel: transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan), diperoleh skor rata-rata persepsi responden sebagai berikut:

Tabel 2 Rata-Rata Persepsi Responden terhadap Masing-Masing Variabel

Variabel	Skor Rata-Rata
Transparansi	4,05
Akuntabilitas	4,00
Kinerja Keuangan	3,99

Sumber: Data Olah Output SPSS 25, 2025

#### Pembahasan

##### 1. Transparansi

Nilai rata-rata **4,05** menunjukkan bahwa responden secara umum *setuju* bahwa pemerintah Kecamatan Sekupang telah menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dari kemudahan akses informasi keuangan, keterbukaan publikasi laporan, dan tersedianya media daring sebagai sarana pelaporan. Temuan ini mendukung teori Mardiasmo (2009) mengenai pentingnya transparansi dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan

publik. Pengaruh transparansi yaitu transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan [9]. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka dan mudah diaksesnya informasi keuangan publik, maka semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Di Kecamatan Sekupang, transparansi diterapkan melalui publikasi laporan keuangan, mekanisme daring, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Penelitian ini mendukung temuan Yuliani (2019) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi anggaran secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas anggaran [14].

## **2. Akuntabilitas**

Skor rata-rata **4,00** juga menjelaskan persepsi yang positif mengenai akuntabilitas pemerintah. Sebagian besar menyatakan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara tepat waktu, terdapat pengawasan internal dan eksternal, serta sanksi bagi pelanggaran anggaran. Hal ini mengindikasikan penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran daerah (Mahmudi, 2011) [8]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tanggung jawab dan ketepatan pelaporan pengelolaan anggaran, maka semakin baik kinerja keuangan yang dihasilkan. Fungsi pengawasan, audit internal dan eksternal, serta pelaporan yang patuh terhadap standar telah dijalankan dengan baik di Kecamatan Sekupang. Prabowo dan Rahmawati (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam peningkatan mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah [4].

## **3. Kinerja Keuangan**

Dengan nilai rata-rata 3,99, persepsi terhadap kinerja keuangan daerah juga berada pada kategori “setuju”. Responden menilai pemerintah daerah dapat melakukan tata kelola anggaran, serta menunjukkan peningkatan dalam laporan keuangan tahunan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan cenderung baik, walaupun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek evaluasi dan prioritas pengeluaran. Pengaruh simultan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, transparansi dan akuntabilitas berkontribusi sebesar 61,8% terhadap variasi kinerja keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R-Square pada hasil analisis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi keterbukaan informasi dan tanggung jawab pengelolaan anggaran berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif. Hasil ini menguatkan temuan Ramadhani (2021), yang menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi dan praktik akuntabilitas yang konsisten merupakan kunci peningkatan kinerja anggaran di pemerintah daerah [7].

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pada pembahasan diatas, penelitian menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Sekupang. Semakin terbuka informasi anggaran dan semakin kuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan daerah. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu terus meningkatkan keterbukaan informasi anggaran, melibatkan masyarakat secara aktif, serta memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi dan pelatihan SDM juga penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan yang berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- [1] A. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- [2] D. N. Gujarati, *Basic Econometrics*, New York: McGraw-Hill, 2009.
- [3] D. Prabowo and I. Rahmawati, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Akunt. Audit Publik*, vol. 19, no. 1, pp. 45–56, 2020.
- [4] D. Prabowo and I. Rahmawati, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja

- Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Keuangan Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 1–12, 2020.
- [5] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- [6] Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006.
- [7] L. Ramadhani, "Implementasi E-Budgeting dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran," *J. Akunt. Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 87–95, 2021.
- [8] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- [9] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, 2006.
- [11] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2008.
- [12] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- [14] S. Yuliani, "Partisipasi Publik dan Transparansi Anggaran Daerah," *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 134–145, 2019.